

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi Pengembangan

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani yaitu *strategos*. Kata *strategos* merupakan gabungan dari kata “*stratos*” yang berarti militer dan “*ago*” yang berarti memimpin. Sebagai bentuk kata kerja, *Strategos* memiliki arti merencanakan (*to plan*).¹⁸ Dalam konteks awal, strategi diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal untuk membuat rencana dalam memenangkan dan menakhlikan perang.¹⁹ Seorang ahli bernama Clausewitz juga menyampaikan bahwa strategi adalah seni pertempuran dalam memenangkan sebuah peperangan. Secara umum, strategi merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan. Dalam strategi terdiri dari berbagai aktivitas vital yang diperlukan dalam mencapai sebuah tujuan.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari strategi adalah rencana cermat yang mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.²¹ Dari pengertian tersebut, konsep dari strategi yaitu

¹⁸ Sudjana, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: Falah Production, 2000), hlm. 5.

¹⁹ Husni Mubarak, *Manajemen Strategi*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), hlm. 10.

²⁰ Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, (Bandung: Kecana, 2016), hlm. 25.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1989), hlm. 964.

pemuaian (*stretch*) bukan lagi konsep kecocokan dan kesepadanan (*fit and match*). Dimana strategi merupakan pilihan tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa mendatang dan cara yang ditempuh untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Sementara, definisi strategi menurut Barry Render dan Jay Heizer adalah rencana aksi organisasi untuk mencapai misi.²² Sebuah organisasi tentunya memiliki misi-misi yang ingin dicapai. Keseluruhan misi organisasi akan mudah dicapai ketika organisasi tersebut memiliki strategi yang terorganisir.

Strategi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran jangka panjang dimana tindakannya sesuai berdasarkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya organisasi yang banyak untuk merealisasikannya. Strategi akan mempengaruhi keberlangsungan suatu organisasi dalam jangka panjang (minimal 5 tahun).²³ Oleh karenanya strategi memiliki orientasi ke masa mendatang. Perumusan strategi dipengaruhi oleh analisa dari faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud dari faktor internal yaitu faktor yang berasal dari organisasi itu sendiri baik dari segi kekuatan maupun kelemahan yang dimilikinya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkungan organisasi baik berupa peluang maupun ancaman. Secara khusus suatu strategi menentukan rumusan tentang apa yang ingin dicapai, dimana arena yang difokuskan, serta bagaimana pelaksanaannya

²² Barry Render dan Jay Heizer, *Prinsip-Prinsip Manajemen Operasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 28.

²³ Fred R. David, *Manajemen Strategi: Konsep*, Edisi sepuluh, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 5.

yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya dan kegiatan pengalokasiannya untuk setiap output yang dapat memnuhi peluang lingkungan dan sekaligus dapat meningkatkan keunggulan bersaing.²⁴

2. Pengertian Pengembangan

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan berasal dari kata kembang yang artinya bertambah sempurna (tentang pribadi, fikiran, pengetahuan dan sebagainya), sehingga pengembangan berarti proses, cara, perbuatan. Sedangkan menurut istilah pengembangan artinya penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan dalam suatu kegiatan.²⁵ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.²⁶ Tujuan pengembangan adalah peningkatan tingkat dan kualitas hidup masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan peluang kerja tanpa merusak sumber daya lingkungan.

Secara konseptual, yang dimaksud strategi pengembangan adalah cara yang dilakukan untuk menganalisis kondisi suatu

²⁴ Sofjan Assauri, *Strategic Marketing: Sustaining Lifetime Customer Value*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 75

²⁵ Indonesia Student, *Pengertian Pengembangan, Jenis dan Contohnya*, <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-pengembangan/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 05.41 WIB.

²⁶ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 222.

perusahaan/organisasi baik kondisi internal (meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki) maupun kondisi internal (meliputi peluang dan ancaman yang akan dihadapi), kemudian akan dicari alternatif untuk merumuskan strategi yang tepat dalam pengembangan yang akan dilakukan. Analisis kondisi internal adalah suatu kegiatan menilai faktor-faktor keunggulan dari perusahaan/organisasi untuk mencari kekuatan-kekuatan maupun kelemahan-kelemahannya, sehingga penyusunan strategi dapat dimanfaatkan secara efektif. Sedangkan untuk merumuskan strategi dalam pengoptimalan peluang serta meminimalisir adanya kegagalan akibat ancaman dari luar dapat dilakukan dengan memanfaatkan strategi secara efektif, kesempatan pasar dan menghadapi hambatannya, mengembangkan profil sumber daya dan keunggulan, membandingkan profil tersebut dengan kunci sukses, dan mengidentifikasi kekuatan utama.

3. Fungsi Strategi

Kata strategi dalam terminologi militer berarti siasat yang menggambarkan cara-cara yang dilakukan oleh pasukan perang dalam mengalahkan musuh. Dari istilah tersebut, para ahli manajemen bisnis mengadopsi kata strategi untuk menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai kinerja puncak dalam rangka melampaui keunggulan pesaingnya. Sehingga muncul istilah baru yang

dikenal sebagai manajemen strategik.²⁷ Yang dimaksud dengan manajemen strategik yaitu seni dan sains dalam memformulasi, mengimplementasi dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi dapat memperoleh tujuannya.²⁸ Dari pengertian tersebut, manajemen strategi berfungsi untuk menyusun, menerapkan dan mengevaluasi strategi yang digunakan.

Adapun fungsi manajemen strategik merupakan elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan ataupun perencanaan yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁹ Menurut Sukarna mengutip dari teori yang dikemukakan oleh George R. Terry bahwa fungsi manajemen strategi menjadi empat yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).³⁰

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan proses awal dalam menentukan hal-hal apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki dan mencari cara yang lebih efektif dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan. Perencanaan memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi mengidentifikasi apa yang benar-benar akan dicapai dan

²⁷ Musa Hubies dan Mukhamad Najib, *Manajemen Strategik (dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi)*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hlm. 19.

²⁸ Fred, R. David, *Manajemen Strategik: Konsep*, Edisi 15, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 3.

²⁹ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 19.

³⁰ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 10.

menentukan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan dasar dari formulasi strategi yang efektif karena implementasi yang sukses dan evaluasi strategi yang baik tergantung pada perencanaannya. Perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut, dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjaga bahwa strategi dan kebijakan telah diimplementasikan/dilaksanakan.³¹ Dengan adanya perencanaan yang baik, organisasi ataupun perusahaan dapat mengambil keuntungan dari peluang eksternal dan juga dapat meminimalisasi dampak ancaman eksternal.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan proses menentukan siapa melakukan apa dan siapa melaporkan kepada siapa. Dengan kata lain, dalam pengorganisasian terdapat pembagian kerja dalam unit-unit kerja berdasarkan kemampuannya masing-masing. Perusahaan yang terorganisasi dengan baik memiliki manajer dan karyawan yang bersama-sama berkomitmen dalam kesuksesan organisasi. Dibandingkan perusahaan yang tidak terorganisasi, perusahaan yang terorganisasi dengan baik mengalokasikan dan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

³¹ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003), hlm. 92

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Sebuah perencanaan yang baik dan pengorganisasian yang rapi tidak akan berarti jika tidak dilaksanakan. Pelaksanaan (*actuating*) merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Dalam proses ini, tiap-tiap unit kerja harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing sumber daya manusia untuk mencapai visi, misi dan program kerja yang telah ditetapkan. Inti dari pelaksanaan (*actuating*) adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Implementasi atau pelaksanaan suatu program merupakan aktivitas yang saling mengaitkan antara tujuan maupun tindakan.³²

d. Evaluasi (*Controlling*)

Fungsi evaluasi manajemen meliputi semua aktivitas yang diambil untuk memastikan bahwa implementasi dari suatu program sama dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Semua manajer dalam organisasi memiliki pertanggungjawaban pengendalian, seperti melakukan evaluasi kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalisasi ketidakefisienan. Tujuan dari evaluasi yaitu mengawasi program kerja agar berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan selama proses pelaksanaan dari program kerja. Selain itu, evaluasi bertujuan untuk pengambilan keputusan tentang

³² Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) hlm. 39.

keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan. Kemudian hasil evaluasi dari program ini bermanfaat bagi upaya pengembangan program yang sama di tempat yang lain.³³

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan agar strategi yang telah disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:³⁴

- a. Mengomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Perumusan strategi untuk tujuan yang diinginkan lalu kemudian mengkomunikasikan tentang unsur-unsur dalam pelaksanaan strategi.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya. Strategi mencoba menghubungkan suatu organisasi dengan individu-individu, dan organisasi lainnya, di mana seluruh hal tersebut dipengaruhi lingkungan yang luas, yang mencakup perubahan teknologi, realita, ekonomi dan nilai-nilai sosial budaya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru. Fungsi ini menghasilkan strategi eksploitasi yang menciptakan nilai baru dari sumber daya yang asing serta aktivitasnya.

³³ Endang Mulyaningsih, *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hlm. 114.

³⁴ Sofjan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 7.

- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Fungsi penting dari hal ini adalah dihasilkannya sumber daya nyata yang penting, selain pendapatan tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai bagi upaya pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
- f. Menanggapi serta beraksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber daya serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.

4. Tingkatan Strategi

Sasaran menunjukkan apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dan setiap perusahaan maupun organisasi harus merancang strategi untuk mencapai sasarannya. Dalam suatu perusahaan/organisasi terdapat tiga tingkatan strategi yaitu strategi tingkat korporasi, strategi tingkat bisnis, dan strategi tingkat fungsional.³⁵

a. Strategi Tingkat Korporasi

Dalam strategi ini memuat penggambaran tujuan perusahaan secara keseluruhan, mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk

³⁵ Retno Dewanti, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Mitra Wcana Media, 2008), hlm. 30.

mencapai keseimbangan produk dan jasa yang disediakan. Strategi ini biasanya berada dalam organisasi yang mempunyai lebih dari satu bisnis atau perusahaan yang melakukan diversifikasi macam-macam produk. Dalam strategi ini terdapat upaya penentuan peran dari masing-masing unit usaha dan juga bisnis apa yang akan dilakukan dalam organisasi tersebut. Model yang digunakan dalam analisis ini antara lain adalah BCG (*Boston Consulting Group*), GE (*General Elektrik*) yang lalu dikembangkan dengan model IE.

b. Strategi Tingkat Bisnis

Dalam tingkat ini, pengembangan strategi bisnis dilakukan dalam level divisi dimana lebih ditekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi bisnis biasanya dilakukan oleh organisasi kecil yang hanya menjalankan satu jalur bisnis, atau organisasi besar yang tidak melakukan diversifikasi dalam bermacam-macam produk atau pasar. Pada tingkat ini perusahaan atau organisasi melakukan berbagai upaya untuk bersaing dalam setiap bisnisnya.

c. Strategi Tingkat Fungsional

Strategi fungsional menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas, misalnya strategi pemasaran, strategi keuangan, strategi sumber daya manusia, strategi operasi dan strategi penelitian dan pengembangan. Strategi ini berada pada departemen fungsional

seperti fabrikasi, pemasaran, sumber daya manusia, R&D, dan keuangan. Berupaya menentukan cara mendukung strategi tingkat bisnis.

5. Strategi Pengembangan Usaha

Berdasarkan jenis pengembangannya, strategi terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Strategi pengembangan pasar

Strategi pengembangan pasar merupakan strategi yang memasarkan produk atau jasa saat ini kepada konsumen di segmen pasar yang baru maupun wilayah area geografis pasar yang baru.

b. Strategi pengembangan produk

Pengembangan produk dilakukan oleh perusahaan yang sedang berusaha bertahan, ingin memperkuat posisi, dan juga memperluas pangsa pasar yang lebih besar. Perusahaan berupaya untuk meningkatkan keunggulan daya saing dari produk atau jasa yang baru dikembangkan ini.

c. Strategi inovasi

Strategi inovasi adalah strategi dijalankan dengan membuka jalan bagi pelanggan baru guna meningkatkan keuntungan dari usaha. Dalam hal ini perusahaan berupaya menemukan inovasi-inovasi yang dapat mendorong perkembangan usahanya.³⁶

³⁶ M. Husni, *Manajemen Strategi*, (Kudus: STAIN KUDUS, 2009), hlm. 37-37.

Melihat dari pernyataan diatas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya untuk melakukan pengambilan keputusan dalam pengembangan perlu adanya strategi. Oleh karena itu, strategi pengembangan yang tepat yaitu dengan adanya analisis SWOT yang merupakan akronim dari *strength*, yang berarti kekuatan, *Weaknes* yang berarti kelemahan yang dimiliki perusahaan, *opportunities* yang berarti peluang dan *threats* yang berarti ancaman lingkungan yang dihadapinya. Analisis SWOT merupakan penilaian terhadap hasil identifikasi situasi strategi perusahaan, untuk menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman.³⁷

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan adalah akar kata dari daya atau *power*. Pemberdayaan juga dimaksudkan sebagai tenaga/kekuatan, proses, upaya, tindakan memberdayakan. Secara etimologis pemberdayaan memiliki kata dasar “daya”, yang artinya kekuatan atau kemampuan, sehingga memiliki arti pemberian kekuatan kepada pihak yang tak berdaya.³⁸ Definisi lain dari pemberdayaan yaitu suatu usaha untuk memberikan dukungan dan rangsangan serta menyadarkan masyarakat atas potensi yang telah dimiliki guna membangun daya masyarakat dan juga mengembangkannya.

³⁷ M. Husni, *Manajemen Strategi...* hlm.55.

³⁸ Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 77.

Proses pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai suatu proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.³⁹ Proses pemberdayaan juga dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Dalam praktek sosial berbasis pemberdayaan, baik pekerja sosial maupun klien melakukan pendekatan kerja bersama sebagai mitra kolaboratif berarti merupakan aktualisasi pemberdayaan.⁴⁰

Berdasarkan konsep tersebut maka proses pemberdayaan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan kerjasama
- b. Menjalani relasi kemitraan
- c. Mengartikulasi tantangan-tantangan
- d. Mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada
- e. Mengidentifikasi arah yang ditetapkan

³⁹ Nazaruddin Margolang, *Pemberdayaan Masyarakat*, 21 April 2017 (<http://pelatihan.distphun.riau.go.id/berita-pemberdayaan-masyarakat.html>) Diakses pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 20.24 WIB.

⁴⁰ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2013), hlm. 2.

- f. Mengeksplorasi sistem-sistem sumber
- g. Menganalisis sistem sumber
- h. Menyusun kerangka pemecah masalah
- i. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber
- j. Memperluas kesempatan-kesempatan
- k. Mengakui keberhasilan
- l. Mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang dicapai.

Pada hakekatnya pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan proses, tanpa bermaksud menafikan hasil dari pemberdayaan itu sendiri. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahannya sumber daya manusia yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa dukungan sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif,

konatif, psikomotorik, afektif dan sumber daya manusia lainnya yang bersifat fisik-material.⁴¹

Dalam kaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat, segala aktivitas dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, masyarakat diberikan kekuatan/kemampuan dalam mendapatkan gaji yang memadai, untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan ketrampilan, sehingga perekonomian mengalami peningkatan. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi adalah suatu usaha untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya dan memiliki upaya untuk mengembangkannya sehingga akan terbentuk daya masyarakat yang optimal. Keberdayaan masyarakat adalah unsur penting yang mendukung bertahannya masyarakat dalam bidang perekonomian. Keberdayaan masyarakat dalam bertahan menjadi apa yang kita kenal sebagai Ketahanan Nasional.⁴²

Menurut Sumodiningrat konsep pemberdayaan ekonomi dapat disimpulkan diantaranya⁴³:

- a. Permasalahan yang terdapat dalam pemberdayaan berada pada masing-masing aspek, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat

⁴¹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: 2004), hlm. 80.

⁴² Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm. 263-264.

⁴³ Andi Nu Graha, *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi* Vol.05 No.02 (Universitas Kanjuruhan Malang:2009), hal.123.

tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun, cabang atau batang maupun akar saja.

- b. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi selain dengan pemberian modal bergulir kepada masyarakat, juga terdapat penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusia, penyediaan prasarana, dan penguatan posisi tawarnya.
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat, untuk itu kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien.
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan pendekatan kelompok

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Secara umum, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki porsi yang sama dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap saling membantu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pemberdayaan. Adanya

dukungan dari berbagai pihak memudahkan kegiatan pemberdayaan dalam mengelola potensi-potensi yang ada khususnya potensi dalam bidang ekonomi guna dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemberdayaan memiliki berbagai tujuan dalam upaya perbaikan, sebagai berikut:

a. Perbaikan kelembagaan (*better institusi*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b. Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

c. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

d. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

e. Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan masyarakat yang lebih baik juga.

f. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.⁴⁴

3. Praktik Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Untuk mencapai sasaran dalam upaya pemberdayaan, dibutuhkan bentuk pemberdayaan yang tepat. Bentuk tepat dari sasaran dalam kegiatan pemberdayaan yaitu pemberian kesempatan kerja pada kelompok masyarakat miskin dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah ditentukan. Adapun terdapat beberapa praktik pemberdayaan dalam bidang ekonomi diantaranya bantuan modal, bantuan pembangunan sarana, bantuan pelatihan, penguatan kelembagaan, dan penguatan kemitraan usaha.⁴⁵

a. Bantuan Modal

Permasalahan paling sering dialami oleh masyarakat dalam melakukan usaha ekonomi adalah masalah permodalan. Modal memegang peran penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi. Keterbatasan modal menjadikan usaha yang dijalankan oleh masyarakat menjadi terhambat dan kemungkinan fatal akan terhenti. Factor modal juga menjadi salah satu tidak munculnya usaha-usaha

⁴⁴ Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Alfabeta:2015), hal.154

⁴⁵ Effendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan*, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2009), hal. 10.

baru di luar sektor ekstraktif.⁴⁶ Oleh karena itu, pemberian bantuan modal dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan.

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberian modal harus mencermati beberapa hal. Diantaranya yaitu: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan; (2) bagaimana pemecahan aspek modal dilakukan melalui penciptaan system yang kondusif untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal agar tidak terjebak pada perekonomian subsisten. Ketiga hal tersebut sangat penting untuk dipecahkan bersama. Inti dari pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai dengan kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi memecahkan permasalahan yang dihadapi.⁴⁷

b. Bantuan Pembangunan Sarana

Usaha mendorong adanya produktivitas dan produk yang dihasilkan. Meningkatnya usaha yang dijalankan tentu akan meningkatkan produktivitas yang dilakukan. Peningkatan tersebut membutuhkan dukungan dari ketersediaan sarana dan prasarana

⁴⁶ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Naskah No. 20, (Jakarta: Naskah Tidak Diterbitkan, 2000), hlm. 7.

⁴⁷ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 80

produksi maupun pemasarannya agar produk terpasarkan dengan efektif. Oleh karena itu, pemberian bantuan berupa pembangunan sarana sangat membantu mengingat sarana adalah komponen penting dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari sisi pemberdayaan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana pendukung membantu peningkatan kualitas desa-desa tertinggal.

c. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan sangat perlu dan penting. Pendamping memiliki tugas dalam memfasilitasi proses belajar dan menjadi mediator untuk menjalin kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah dengan usaha besar. Pemilihan pendamping dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak boleh dilakukan secara asal mengingat peran pendamping yang cukup penting. Pengalaman empirik dari pelaksanaan IDT, P3DT, dan PPK, dengan adanya pendamping eksitu (pendamping dari luar) membutuhkan biaya transaksi bantuan modal yang cukup besar baik untuk upah pendamping eksitu maupun untuk biaya pelatihan.⁴⁸ Sehingga, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan lebih baik dipilih pendamping insitu. Mengingat bahwa kegiatan pemberdayaan tidak hanya dilakukan satu atau dua tahun saja melainkan bisa berlanjut hingga puluhan tahun.

⁴⁸ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan masyarakat...* hlm. 9.

d. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi seorang individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.⁴⁹ Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dilakukan melalui pendekatan kelompok karena masyarakat miskin mengalami kesulitan dalam mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi secara individual.⁵⁰ Karena pendekatan individual tidak memberikan hasil yang memuaskan. Dengan melalui pendekatan kelompok, akumulasi modal bisa tercapai dan juga pengendalian distribusi hasil produksi dan input produksi bisa terlaksana dengan maksimal. Selain itu, ada 3 aspek kelembagaan yang lain dalam rangka pemberdayaan di bidang ekonomi yaitu dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi.⁵¹

e. Penguatan Kemitraan Usaha

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan penguatan bersama dimana tidak ada istilah menonjolkan kelompok ekonomi kuat tetapi saling berbagi kekuatan dengan sesama. Yang artinya

⁴⁹ Jenivia Dwi Ratnasari, "Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang" *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1 No 3. 2013, hlm. 103.

⁵⁰ Guntur Effendi M., *Pemberdayaan Ekonomi ...* hlm. 12.

⁵¹ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan masyarakat...*, hlm. 9.

dimana yang besar akan berkembang jika ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang jika ada yang besar dan menengah. Jika keterkaitan produksi terjalin dengan adil maka efisiensi akan terbangun dan daya saing tidak tinggi. Oleh karena itu, menjalin kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak dapat diberdayakan.⁵²

C. Masyarakat Miskin

1. Pengertian Masyarakat Miskin

Kemiskinan merupakan suatu keadaan individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam hal ekonomi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemiskinan dalam arti sempit diartikan sebagai kondisi masyarakat yang kekurangan uang dan barang dalam menjamin kelangsungan hidupnya.⁵³ Menurut ahli statistik di BPS dan Pemerintah mendefinisikan kemiskinan sebagai individu yang berada di bawah garis kemiskinan yang bervariasi definisinya.⁵⁴ Menurut Mudrajat Kuncoro, kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan, dimana tolak ukur dari kemiskinan didasarkan pada kegiatan konsumsi. Berdasarkan kegiatan konsumsi, garis kemiskinan memiliki

⁵² Guntur Effendi M., *Pemberdayaan Ekonomi ...* (Jakarta: CV Sagung Seto, 2009), hlm. 12

⁵³ Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 280.

⁵⁴ Tri Wibowo Budi Santoso & Hadi Susilo, *Ekonomi Indonesia/Hal Hill penerjemah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda, 2002), hlm. 252.

dua unsur yaitu pengeluaran yang dibutuhkan untuk pembelian kebutuhan dasar dengan standar gizi minimum dan pengeluaran untuk keperluan lain sebagai biaya partisipasi masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.⁵⁵

Pada umumnya, setiap negara memiliki definisi tersendiri dari masyarakat yang digolongkan miskin. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat miskin yang tergolong relatif yang artinya setiap negara memiliki kondisi yang berbeda seperti kondisi sosial, kondisi perekonomian, maupun standar kesejahteraan. Setiap definisi dari masyarakat miskin ditentukan berdasarkan kriteria atau ukuran-ukuran kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumen rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan. Kemiskinan dapat dilihat dari rendahnya kemampuan individu dalam bidang ekonomi (pendapatan yang rendah), rendahnya kualitas pendidikan maupun tingkat kesehatannya.

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak individu atau kelompok meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang

⁵⁵ Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia...*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 280-281.

Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Kondisi masyarakat miskin dapat diketahui dari tingkat kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan dalam pemenuhan standar hidup. Standar hidup masyarakat tidak hanya terpenuhinya tiga kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) tetapi juga terpenuhinya kebutuhan dari segi kesehatan dan pendidikan. tempat tinggal yang layak juga merupakan bagian dari standar hidup dan juga bisa menjadi standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan keadaan tersebut, masyarakat dikatakan miskin jika memiliki pendapatan yang rendah dibandingkan dari rata-rata pendapatan sehingga ia tidak berkesempatan memenuhi standar hidup guna mensejahterakan dirinya.⁵⁶

2. Karakteristik Masyarakat Miskin

Sharp menyebutkan ada tiga faktor yang mendorong terjadinya kemiskinan jika dilihat dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan terjadi akibat timpangnya distribusi pendapatan akibat dari ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya. Ketimpangan terjadi akibat kesenjangan kepemilikan antara masyarakat kaya yang menguasai sumber daya sedangkan masyarakat miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas

⁵⁶ Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, UPP. AMP YKPN, (Yogyakarta: Jarnasy, 2004)

dengan kualitas yang rendah. Kedua, kemiskinan terjadi akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Akses pendidikan, faktor keturunan, nasib yang kurang beuntung dan diskriminasi berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Ketika kualitas sumber daya manusia rendah maka produktivitas juga akan rendah, begitu pula sebaliknya. Ketiga, kemiskinan terjadi akibat perbedaan akses modal. Masyarakat miskin biasanya memang lemah dalam hal permodalan. Jika akses permodalan bagi masyarakat miskin tetap sulit maka kemiskinan tetap akan ada sampai kapanpun.⁵⁷

Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Masyarakat miskin banyak yang masih menderita gizi buruk akibat tidak terpenuhinya asupan nutrisi yang seimbang. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin juga masih belum memadai sehingga ketimpangan sosial masih terus ada. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.⁵⁸

Menurut Suryawati, masyarakat miskin memiliki ciri-ciri diantaranya:

⁵⁷ Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2010).

⁵⁸ Whisnu Adhi Saputra, "*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*", (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), hlm 16-21

- a. Mempunyai pendidikan yang rendah
- b. Kebanyakan mempunyai usaha sendiri atau bekerja dalam sektor informal, yang sifatnya kecil.
- c. Tidak mempunyai faktor produksi sendiri misalnya tanah, keterampilan dan peralatan untuk bekerja.
- d. Kurangnya memperoleh fasilitas umum.
- e. Masyarakat miskin.⁵⁹

Menurut Chamber, kemiskinan dibagi menjadi terbagi menjadi empat bentuk berdasarkan kondisinya. Bentuk-bentuk dari kemiskinan yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

- a. Kemiskinan absolut, ditandai dengan ketidakmampuan seseorang atau kelompok dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini terjadi karena besarnya pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga ia tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar minimum seperti sandang, pangan, papan, kesehatan maupun pendidikan. Yang dimaksud dengan garis kemiskinan adalah pengeluaran rata-rata untuk memenuhi kebutuhan dasar/pokok dalam pemenuhan standar kesejahteraan. Garis kemiskinan biasanya digunakan sebagai konsep untuk menentukan kriteria miskin.
- b. Kemiskinan relatif, dimana terdapat ketimpangan pada pendapatan akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata atau

⁵⁹ Suryawati Chriswardani, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional", *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 8 No 3, September 2005, hlm. 121-129. (<http://www.jmpk-online.net>)

belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dikatakan sebagai daerah tertinggal karena daerah tersebut belum terjangkau oleh program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

- c. Kemiskinan kultural, lebih mengacu pada masalah sikap maupun perilaku seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak ada kemauan untuk memperbaiki perekonomian, dan juga tidak memiliki kreativitas dalam memanfaatkan bantuan dari pihak lain.
- d. Kemiskinan struktural, disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang ada. Bentuk kemiskinan ini kerap kali menjadi pemicu dari kemunculan dari tiga bentuk kemiskinan lainnya.⁶⁰

3. Ukuran dan Indikator Kemiskinan

Dalam mengukur tingkat kemiskinan seringkali didasarkan pada ukuran rata-rata pendapatan maupun rata-rata pengeluaran masyarakat di suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik Ponorogo, dalam mengukur tingkat kemiskinan digunakan cara perhitungan *Head Count index*. Yang dimaksud dengan *Head Count index* adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

- a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1) adalah ukuran pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks

⁶⁰ Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)

semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk terhadap Garis Kemiskinan.

- b. Indeks Keparahan Kemiskinan (p2) adalah ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi pula pengeluaran penduduk miskin.⁶¹

Sedangkan menurut Sayogyo menjelaskan tentang teori dari Lincolin Arsyad kemiskinan dapat di lihat atau di ukur dari:⁶²

- a. Indikator Tingkat Konsumsi Beras

mengukur berapa banyak tingkat konsumsi beras per kapita per tahun, dengan rincian ada tiga kategori miskin yaitu sangat miskin, miskin dan nyaris miskin.

- b. Indikator Tingkat Pendapatan

Dalam pengukuran pendapatan di lihat dari pendapatan perkapita. Dan dapat di lihat dari Garis kemiskinan, Jumlah penduduk miskin di ukur dari pengeluaran per hari satu dolar Amerika. Kalau ukuranya dua dolar per hari maka termasuk miskin.

- c. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada berbagai komponen tingkat kesejahteraan yang lain yang sering digunakan. Pada publikasi UN (1961) yang berjudul *International Definitin and Measuremen of Levels of Living: An Interim Guide* disarankan 9 komponen

⁶¹ Badan Pusat Statistik, *Ponorogo Dalam Rangka*, Katalog BPS: 1102001.3502, (Ponorogo: Tidak Diterbitkan, 2016).

⁶² Widodo H. Suwadi, *Masalah dan Kebijakan Pembangunan*, (Ponorogo: Tidak Diterbitkan, 2014), hlm. 27.

kesejahteraan yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, rekreasi dan kebebasan.

Pengukuran mengenai kemiskinan masyarakat lambat laun mengalami perluasan hingga menyertakan dimensi sosial politik sebagai referensi dalam menunjukkan terbentuknya kemiskinan. Hasil keseluruhan dari pengukuran tersebut kemudian dijadikan sebagai indikator-indikator sosial dalam pembangunan. Adapun indikator-indikator kemiskinan diuraikan sebagai berikut:

a. Indikator kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi

Dimensi ekonomi dari kemiskinan dimaknai sebagai kekurangan sumber daya baik secara finansial maupun kekayaan lainnya yang akan digunakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶³ Dalam dimensi kemiskinan tolak ukur yang digunakan yaitu pendapatan per kapita untuk melihat kemiskinan dari segi pendapatan dan garis kemiskinan untuk melihat kemiskinan dari segi pengeluaran.

b. Indikator kemiskinan berdasarkan dimensi peran pemerintah

Pemerintah memiliki peran sebagai regulator sekaligus dinamisatir daalam perekonomian sehingga berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia program penanggulangan kemiskinan dibiayai melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan

⁶³ Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, UPP. AMP YKPN, (Yogyakarta: Jarnasy, 2004), hlm. 123.

Belanja Negara). Dalam upaya penanggulangan kemiskinan menggunakan prinsip sebagai upaya peningkatan pembangunan di bidang sumber daya manusia dan pemenuhan sarana maupun prasarana fisik.

c. Indikator kemiskinan berdasarkan dimensi kesehatan.

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat miskin akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan kesehatan. Masyarakat miskin tidak mampu menjangkau standar kesehatan yang layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Dampak dari kondisi tersebut adalah tingginya risiko terhadap serangan penyakit maupun gizi buruk atau yang lebih fatal menimbulkan risiko tinggi akan kematian. Namun, indikator pelayanan air bersih maupun air minum juga merupakan bagian dari standar hidup masyarakat di suatu daerah.

D. Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL)

1. Pengertian Program Jalin Matra

Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) adalah program yang didesain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya (wong cilik) berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2015 dengan memperhatikan data

PPFM 2018 dengan status kesejahteraan 30% terendah.⁶⁴ Program ini merupakan bentuk realisasi dari perluasan Program Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019. Dalam RPJMD tertuang visi pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu “Jawa Timur lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berakhlak” dan dengan misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”. Sehingga, komitmen yang dibuat Pemerintah Jawa Timur adalah menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based growth*) dan pengarusutamaan gender.⁶⁵

Program Jalin Matra ini dirancang memiliki 3 (tiga) kegiatan unggulan yaitu:

- a. Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM), yang merupakan kelanjutan dari Program Jalin Kesra dengan sasaran rumah tangga dengan status kesejahteraan 1-5% terendah (Desil 1);
- b. Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan sasaran kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dengan tingkat kesejahteraan 1-10% terendah (Desil 1); dan
- c. Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dengan sasaran rumah tangga dengan status kesejahteraan 11-30% terendah

⁶⁴ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *JaLIN Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan: Pedoman Umum*, (Surabaya: Buku Tidak Diterbitkan, 2019), hlm. 5.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

(Desil 2 dan 3) dan pengembangan usaha ekonomi BUM Desa atau unit usaha BUMDesa yang sudah berjalan.⁶⁶

2. Landasan Hukum Program Jalin Matra

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);

- i. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur.⁶⁷

3. Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL)

Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) merupakan bantuan pengentasan kemiskinan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan sasaran utama yakni warga desa yang masuk ke dalam golongan Rumah Tangga Sangat Miskin. Program ini berdasarkan dengan misi ke-7 (tujuh) dalam

⁶⁷ Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur.

RPJMD 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Trenggalek yakni meningkatkan peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang kurang mampu maupun miskin, melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dengan kegiatan yang dimasyarakatkan atau disebut dengan Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL). Program Jalin Matra Mandiri ini disesuaikan dengan tekad pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengurangi tingkat pengangguran serta mengentaskan kemiskinan. Kelompok penerima bantuan Jalin Matra Mandiri ini adalah RTSM hasil verifikasi dan klarifikasi data PBDT 2015 dan atau data lain yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

4. Maksud dan Tujuan Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL)

Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Tujuan diadakannya kegiatan Jalin Matra Mandiri dalam bentuk kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah :

- a. Memberdayakan masyarakat agar ketahanan ekonominya meningkat.
- b. Meningkatkan pendapatan bagi masyarakat khususnya Pokmas keluarga miskin.

- c. Membantu mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari utamanya anggota pokmas dan masyarakat sekitarnya.
- d. Menstabilkan fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok dan mengatasi kesenjangan harga yang mencolok di perdesaan.
- e. Membantu percepatan dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di perdesaan.
- f. Menampung, memasarkan dan mengembangkan produk unggulan desa.⁶⁸

Dengan kegiatan Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) diharapkan mampu meningkatkan *skill* dan ketrampilan dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa. Keberhasilan pengembangan usaha ekonomi ini yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok usaha. Kesejahteraan yang dimaksudkan yaitu pendapatan para anggota kelompok semakin meningkat dan juga mampu membantu masyarakat dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dikala fluktuasi perekonomian tidak menentu.

5. Lokasi Usaha Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL)

Lokasi kegiatan Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) diprioritaskan pada warga masyarakat yang tergolong Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Desil 1 dan 2

⁶⁸ Pemerintah Kabupaten Trenggalek, *Buku Pedoman Umum Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL)* Tahun 2019, hlm. 2.

berdasarkan Pendataan PBDT 2015 yang berasal dari database terpadu milik Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) atau data lain yang bisa dipertanggungjawabkan dan lebih akurat. Lokasi Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Dinas teknis) dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Desa yang belum mendapatkan alokasi bantuan kegiatan sejenis.⁶⁹ Pelaksanaan usaha Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah ini dilaksanakan oleh kelompok masyarakat miskin dengan mengelola Usaha Bersama yang akan dikelola serta dikembangkan secara bersama oleh kelompok masyarakat miskin itu sendiri, yang dikendalikan dan dibina oleh pemerintah desa dan didampingi oleh pendamping yang ditunjuk.

6. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL)

Pelaksanaan usaha Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah ini dilaksanakan oleh kelompok masyarakat miskin dengan mengelola Usaha Bersama yang akan dikelola serta dikembangkan secara bersama oleh kelompok masyarakat miskin itu sendiri, yang dikendalikan dan dibina oleh pemerintah desa dan didampingi oleh pendamping yang ditunjuk. Adapun prinsip-prinsip dari pelaksanaan program Jalin Matra KEPEL adalah sebagai berikut.⁷⁰

a. Kepedulian Sosial

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) pada hakikatnya merupakan pengaplikasian peran negara terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat kurang mampu dalam ketahanan hidup. Dalam hal ini negara wajib menggerakkan Pemerintah, PemProv, PemKab, PemKot Pemerintah Desa/Kelurahan dan warganya untuk menjalankan kegiatan kepedulian sosial. Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada masyarakat miskin agar memiliki usaha perekonomian.

b. Partisipatoris

Kegiatan Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) dilaksanakan dengan membuka ruang umum kepada Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan yang biasanya terjadi dalam *Rembug Warga/ Udhar Gelung*.

c. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) dilakukan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada anggota kelompok dan pemerintah desa maupun pihak yang berkepentingan, disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan

dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak luar untuk memberikan kritik maupun saran terkait perbaikan pelaksanaan program.

d. Keterpaduan

Dalam pelaksanaan program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) pihak-pihak seperti Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, swasta dan masyarakat yang memiliki kepedulian sosial dilibatkan guna mendukung adanya kerjasama yang sinergis.

e. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) pada dasarnya merupakan stimulan bagi RTSM dalam rangka tumbuh dan berkembangnya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat miskin. Selanjutnya pemerintah Desa berkewajiban membina dan mengembangkan usaha RTSM secara berkelanjutan.

f. Sederhana, Mudah dan Murah

Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) ini dilaksanakan secara sederhana dalam pengelolaannya, mudah dalam rangka pelayanan dan murah dalam rangka pembelanjanya. Sehingga seluruh anggota kelompok masyarakat miskin yang ikut dalam tanam saham akan merasakan manfaat dari kegiatan ini.

7. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) antara lain :⁷¹

a. Bantuan Keuangan Khusus

Bantuan Keaungan Khususs merupakan bantuan kueangan dari Pemkab kepada Pemdes. Bantuan ini ipergunakan untuk bantuan operasional program dan bantuan modal usaha ekonomi bagi RTSM taeket Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL).

b. Verifikasi dan Klarifikasi

Verifikasi merupakan kegiatan pencermatan data PBDT 2015 atau data lain yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kecocokaan keadaan riil masyarakat miskin di desa penerima program yang dilaksanakan melalui kegiatan Rembug Terbatas. Klarifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan keadaan fisik dari rumah tangga sasaran yang telah didapat melalui proses verifikasi, dengan melakukan observasi langsung guna memperoleh data yang valid dan akurat dari rumah tangga sasaran.

c. Bantuan Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL)

Bantuan dalam bentuk saham bagi Rumah Tangga Sasaran Hasil Verifikasi dan Klarifikasi yang dimanfaatkan untuk modal usaha bersama berupa toko sembako milik kelompok Rumah Tangga

⁷¹ Pemerintah Kabupaten Trenggalek, *Buku Pedoman Umum Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL)* Tahun 2019, hlm. 4.

Sangat Miskin guna memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari yaitu pemenuhan kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok.

d. Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) agar sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional. Pendampingan dilaksanakan oleh para Pendamping Kelompok yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (Dinas Teknis) dan ditetapkan melalui musyawarah sosialisasi di tingkat Desa untuk mendampingi mulai persiapan, pelaksanaan dan pengembangan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat kelompok.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh Bernardus, memiliki tujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran terkait penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat di Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU dalam bidang ekonomi kemasyarakatan. Penelitian ini merupakan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian diperoleh hasil yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, pemerintah desa melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu terletak pada penggunaan metode penelitian dan mengkaji tentang pemberdayaan

masyarakat di bidang ekonomi sebagai program meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi objek penelitian.⁷²

Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Cendriono dkk, memiliki tujuan untuk mengetahui penyelenggaraan Program Jalin Matra PK2 di Dsa Kaibon. Penelitian ini merupakan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah guna meningkatkan kinerja keuangan pemerintah serta usaha masyarakat, pemerintah desa mengadakan pelatihan akuntansi serta kewirausahaan untuk para anggota BUMDes dan juga penerima bantuan PK2. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama mengkaji penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya fokus penelitian ini adalah pelatihan akuntansi bagi BUMDes sebagai pengelola dana pinjaman dan juga jenis program yang diselenggarakan.⁷³

Penelitian yang telah dilakukan oleh Yudiantoro Tri Kurniawan, memiliki tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Jalin Matra PK2 di Desa Ngroto dan dampaknya, selanjutnya dirancang strategi utnk mengoptimalkannya. Jenis metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian diperoleh hasil yaitu

⁷² Bernardus Seran Kehik, "Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara)", *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2018, hlm. 6.

⁷³ Nanang Cendriono et.all., "Pelatihan Akuntansi dan Wirausaha Pengelolaan Bantuan dan Penerima Bantuan Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun", *Jurnal Terapan Abdimas*, Vol. 3 No. 1, Januari 2018, hlm. 14-18.

dalam upaya pengoptimalan program Jalin Matra PK2 diperlukan dukungan dalam hal permodalan, teknologi, informasi-informasi tentang perdagangan, manajemen bisnis/usaha dan dukungan dari koneksi profesional. Persamaan penelitian ini terletak pada jenis metode penelitian yang digunakan dan strategi pengoptimalan program. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan jenis program pengentasan kemiskinan yang diteliti.⁷⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Inda Ni'matun Nada yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin di Kabupaten Tulungagung bertujuan untuk mengetahui program Jalin Matra BRTSM di Kabupaten Tulungagung beserta kendala dan solusi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Dari penelitian diperoleh hasil Program Pemberdayaan melalui dana Jalin Matra BRTSM bentuk usaha yang dijalankan oleh RTS adalah berbeda-beda sesuai keinginan RTSM serta potensi yang ada di desa mereka. Untuk usaha yang dikembangkan melalui Jalin Matra BRTSM di Desa Pandansari ada tiga jenis usaha yakni usaha ternak kambing, Toko perancangan, dan pembuatan batu bata. Sedangkan kendala dalam pelaksanaannya adalah dana yang di berikan satu kali saja, tidak berkelanjutan, sehingga dana sebesar itu sangat minim untuk pengembangan usaha, dan terdapat kecemburuan sosial. Solusinya Pemanfaatan dana harus di laksanakan dengan baik dan benar dan

⁷⁴ Yudiantoro Tri Kurniawan, “ Strategi Optimalisasi Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (Studi Kasus Program Jalin Matra PK2 di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”, *Jurnal Litbang Kebijakan*, Vol. 12 No. 1, Juni 2018, hlm. 98.

sosialisasi kepada masyarakat tentang bantuan dana dari pemerintah, Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas tentang pemberdayaan perekonomian. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan hanya berfokus pada pelaksanaan Program Jalin Matra BRTSM.⁷⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Iin Sarinah dkk bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Jenis metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan indikator program strategi pemberdayaan karena dari 10 indikator hanya 3 indikator yang terlaksana dengan baik sedangkan sisanya belum. Pemerintah Desa Pangandaran melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Diantaranya yaitu penganggaran dana desa untuk kegiatan pelatihan pelaku usaha, pencarian informasi terkait pembuatan legalitas, dan menjalin komunikasi baik dengan pihak lain. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas tentang pemberdayaan

⁷⁵ Ina Ni'matun Nada, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin di Kabupaten Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019)

ekonomi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan jenis program yang dilaksanakan.⁷⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang, memiliki tujuan untuk mengetahui urgensi peran Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mojokerto dalam pemberdayaan masyarakat. Jenis metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa program-program dalam bidang usaha ekonomi seperti adanya bantuan perorangan atau lembaga merupakan program yang sudah diselenggarakan oleh BPM Kota Mojokerto. Program pemberdayaan yang telah dilaksanakan juga berdampak baik pada peningkatan kemandirian ekonomi terutama pada kegiatan produktivitas dan juga pendapatan penerima bantuan. Persamaan penelitian ini terletak pada jenis metode penelitian yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif dan juga memiliki persamaan karena meneliti pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian dan tidak memfokuskan pada program Jalin Matra PK2.⁷⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Lifa Indri Astuti dkk, memiliki tujuan untuk mencari tahu, memberikan deskripsi dan analisis terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Asmorobangun dalam

⁷⁶ Iin Sarinah dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran", *Jurnal Moderat*, Vol. 5 No. 3. Agustus 2019, hlm. 267-277.

⁷⁷ Bambang Supriyono, et.all., "Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. I, No. 4, hlm. 9-14.

pembangunan pertanian berkelanjutan. Jenis metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa ada beberapa tahapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Asmorobangun. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya yakni tahap penyadaran, tahap pengakapasitasan, dan tahap pendayaan. Tahapan-tahapan ini ditempuh guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan kemampuan dan kekuatan atas potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini meskipun sudah melewati tahapan yang telah ditetapkan, namun masih belum maksimal akibat kurangnya dukungan masyarakat terhadap pembangunan pertanian berkelanjutan. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas tentang pemberdayaan perekonomian. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan hanya berfokus pada pembangunan pertanian saja.⁷⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Chusnul Rohmawati selain bertujuan untuk mengetahui implementasi dari program Jalin Matra PK2 dalam pemberdayaan ekonomi Keluarga, juga bertujuan untuk mengetahui dampak, kendala maupun solusi dalam implementasi program tersebut di Desa Bangoan Kecamatan Bangoan Kabupaten Tulungagung. Jenis metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian diperoleh hasil yaitu implementasi program Jalin Matra PK2 yang dilaksanakan secara bertahap berdampak positif dan negatif pola perekonomian masyarakat Desa Bangoan. Persamaan penelitian ini

⁷⁸ Lifa Indri Astuti, et.all., "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi pada Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 11, hlm. 1886-1892

terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas tentang pemberdayaan perekonomian. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya.⁷⁹

Penelitian yang dilakukan Oleh Ulin Nuha bertujuan untuk memotret pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Kabupaten Blitar beserta analisis dampaknya terhadap peningkatan ekonomi keluarga muslim yang ada. Jenis metode penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian diperoleh hasil yaitu keterlibatan semua pihak pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program. Selain itu program pengentasan kemiskinan ini memberikan dampak yang cukup baik akibat adanya peningkatan produktivitas yang dilaksanakan. Persamaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan.. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, fokus penelitiannya, dan juga metode penelitian yang digunakan.⁸⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Murdiansyah, memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi terkait dampak dari Program Gerdu-Taskin (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Malang dan juga terkait apa saja faktor-faktor yang

⁷⁹ Chusnul Rohmawati, *Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Melalui Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hlm. 2.

⁸⁰ Zulfa Ulin Nuha, *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) untuk peningkatan ekonomi Keluarga Muslim di Kabupaten Blitar*, (Malang: Thesis Tidak Diterbitkan, 2018).

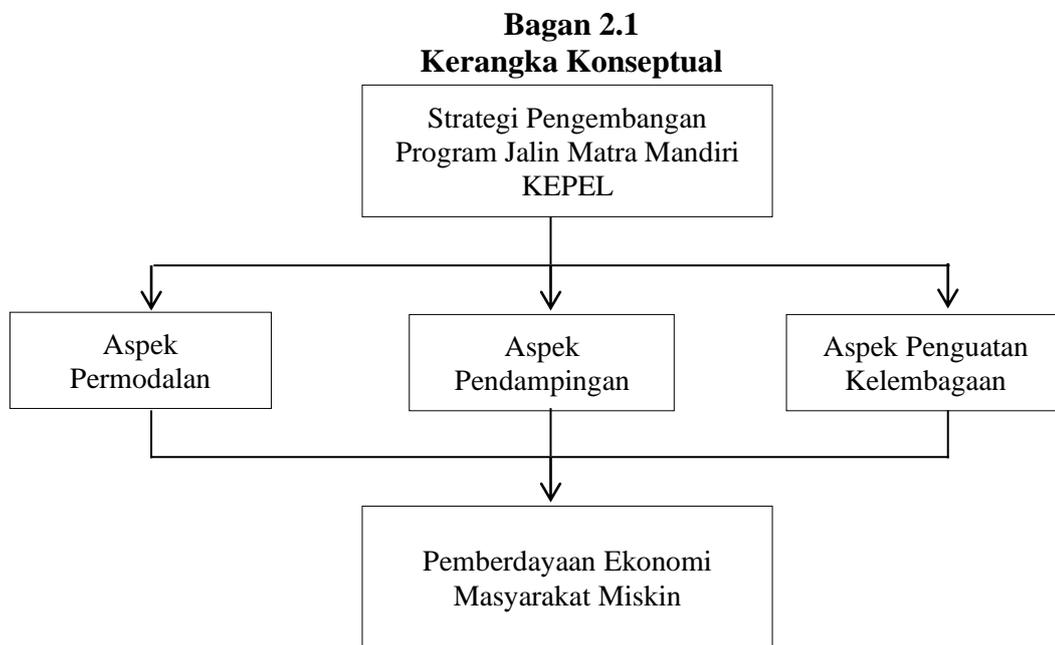
mendukung maupun menghambat pelaksanaan dari program tersebut. Jenis metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian diperoleh hasil yaitu program Gerdu Taskin sangat berperan efektif dalam pemberdayaan, peningkatan kemandirian usaha masyarakat serta peningkatan pengembangan kelembagaan desa. Permasalahan yang dialami terletak pada keterbatasan modal usaha, dukungan kelembagaan dan koordinasi antar pengelola. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas tentang pemberdayaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya.⁸¹

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Yuniati dkk yang berjudul “Penguatan Kelembagaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tebu” bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penguatan kelembagaan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani tebu. Jenis metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa penguatan kelembagaan yang dilakukan untuk mendorong petani meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya yaitu dengan merumuskan strategi penguatan kelembagaan dari aspek organisasi, aspek sumberbudaya, aspek pelayanan, dan aspek kemitraan. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas tentang pemberdayaan dalam

⁸¹ Isnan Murdiansyah, “Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang), *Jurnal WIGA*, Vol. 4 No. 1 Maret 2014, hlm. 71-92.

aspek penguatan kelembagaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitiannya.⁸²

F. Kerangka Konseptual



Keterangan:

Strategi Pengembangan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Mandiri Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (KEPEL) dalam aspek permodalan, pendampingan dan penguatan kelembagaan adalah upaya dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi khususnya masyarakat miskin.

⁸² Sri Yuniati dkk, "Penguatan Kelembagaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tebu", *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis, (SNAPER-EBIS 2017)* Jember, 27-28 Oktober 2017 (hal 498-505)